

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJIP )  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA SERANG  
KECAMATAN WALANTAKA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

### Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga Kecamatan Walantaka Kota Serang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LKjIP ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara keseluruhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Walantaka tahun 2022 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang isinya berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Kota Serang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Walantaka tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Government. Dan merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022.

Dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan tolak ukur target pencapaian kinerja di Kecamatan Walantaka serta dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang urusan demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Serang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga Dokumen LKjIP Kecamatan Walantaka tahun 2022 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 27 Januari 2023

CAMAT WALANTAKA  
  
MUSLIM SHOLEH, S.Pd., M.Si  
NIP. 19830410 200801 1 010

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum .....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
1.5 Gambaran Umum .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.1.1 Visi .....	12
2.1.2 Misi .....	14
2.2 Strategi dan Kebijakan.....	15
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
2.4 Perjanjian Kinerja .....	16
2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja.....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>27</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	27
3.1.1 Indeks Kepuasan Pelayanan .....	32
3.1.2 Hasil Evaluasi LKjIP .....	35
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	37
3.3 Realisasi Anggaran .....	54
<b>BAB IV TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI .....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Proyeksi Masa Depan.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Proyeksi Masa Depan.....	59

# DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

## Halaman

### GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi .....	7
-----	---------------------------	---

### TABEL

1.1	Data Kelurahan .....	6
1.2	Daftar Klasifikasi PNS .....	8
2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 .....	16
2.2	Program dan Pagu Anggaran .....	17
2.3	Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2022 .....	19
3.1	Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	28
3.2	Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	31
3.3	Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2018 s.d 2022 ....	37
3.4	Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Dalam RPJMD .....	40
3.5	Tabel Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	43
3.6	Tabel Hasil Laporan EPDES KEL tahun 2022 .....	48
3.7	Tabel Lokus Sarpras Kelurahan .....	52
3.8	Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan urusan kewilayahan merupakan salah satu program pembangunan yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah, dan seiring bergulirnya penyelenggaraan pembangunan dengan pemberian otonomi yang luas kepada daerah dengan maksud untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan potensi daerahnya masing-masing dimana berbagai pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari sentralisasi kearah desentralisasi dan berbagai keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai begitu juga dengan munculnya berbagai permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan. Untuk menjawab berbagai perkembangan, permasalahan, kendala dan tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah sekarang ini, perlu adanya upaya atau usaha melalui kerja keras dan nyata dalam menata masa depan yang tepat dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam melaksanakan pembangunan kedepan.

Menyikapi hal tersebut diatas Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan program pembangunan pada urusan kewilayahan kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan, Kecamatan Walantaka memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas Kecamatan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan Umum, Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA), dimana telah termuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut yang telah dituangkan baik dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) memanfaatkan segala sumber daya yang ada baik dana, sarana prasarana maupun sumber daya lainnya yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan pembangunan kewilayahan kecamatan serta harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Walantaka Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tatacara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Walantaka tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Renstra, selain maksud tersebut diatas juga bermaksud sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kecamatan Walantaka.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penggunaan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah/Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja memuat ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan walantaka Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 22 yang menyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan bertitik tolak dari Perubahan Kedua RENSTRA Kecamatan walantaka Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan walantaka Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan walantaka Tahun 2022, serta hasil reviu sasaran dan indikator RENSTRA Kecamatan walantaka, maka penyusunan LKjIP Tahun 2022 menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang demokratis, transparan, akuntabel, berdayaguna dan bertanggungjawab.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan walantaka Tahun 2022 antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan walantaka selama tahun 202 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi yang

tertuang dalam Perubahan Kedua RENSTRA Kecamatan walantaka Tahun 2018-2023;

Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Kecamatan walantaka untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kecamatan walantaka.

### **1.3 Landasan Hukum**

LKjIP Kecamatan Walantaka sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LKjIP Kecamatan Walantaka Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 )
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2021-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Serang nomor 58 tahun 2017 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 25);
15. Peraturan Walikota Serang nomor 27 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan LKJiP Kecamatan Walantaka Kota Serang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, Gambaran Pelayanan Umum Instansi Pemerintah dan sistematika penulisan LKJiP Kecamatan Walantaka.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- b. Rencana Kerja Tahunan;
- c. Indikator Kinerja Utama berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis;
- d. Perjanjian Kinerja;

Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran dan penghargaan.

## **BAB IV TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN**

### **SEBELUMNYA**

Pada bab ini menguraikan langkah dan upaya yang dilakukan untuk menindak lanjuti hasil rekomendasi evaluasi penilaian laporan akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja di masa akan datang.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang pengantar penutup dokumen LKjIP Kecamatan Walantaka Tahun 2022

## **1.5 Gambaran Umum**

### **A. Kondisi Geografis**

Kecamatan Walantaka merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Serang. Kecamatan Walantaka merupakan salah satu Kecamatan dari enam Kecamatan yang ada di Kota Serang, terletak disebelah timur Kota Serang. Kecamatan Walantaka merupakan wilayah pembangunan bagian timur dari Kota Serang, wilayah pembangunan wilayah timur ini diarahkan dengan fungsi utama adalah Perdagangan, Jasa, Pemerintahan, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Umum.

Secara Administratif Kecamatan Walantaka, terdiri dari 14 Kelurahan dengan jumlah 420 RT dan RW. Dengan Ibu Kota Kecamatan berada di Kelurahan Pipitan. Dengan luas wilayah 36,56 km<sup>2</sup> terletak pada jarak ± 11 km di Pusat Pemerintahan Kota Serang dan ± 9 km jarak ke Pusat Provinsi Banten dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kragilan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciruas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Petir dan Cikeusal

**Tabel 1.1 Data Kelurahan**

NO	KELURAHAN	JML RW	JML RT
1	WALANTAKA	5	12
2	CIGOONG	4	16
3	NYAPAH	8	16
4	PENGAMPELAN	7	32
5	KIARA	6	40
6	PAGER AGUNG	5	25
7	KALODRAN	7	21
8	KEPUREN	10	19
9	TERITIH	10	55
10	PABUARAN	4	14
11	PASULUHAN	4	14
12	TEGAL SARI	5	20
13	PIPITAN	7	34
14	LEBAK WANGI	5	15
		87	333
	TOTAL	420	

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Serang melalui Peraturan Walikota Serang Nomor 27 Tahun 2022.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Susunan organisasi Kecamatan Walantaka sebagaimana berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :

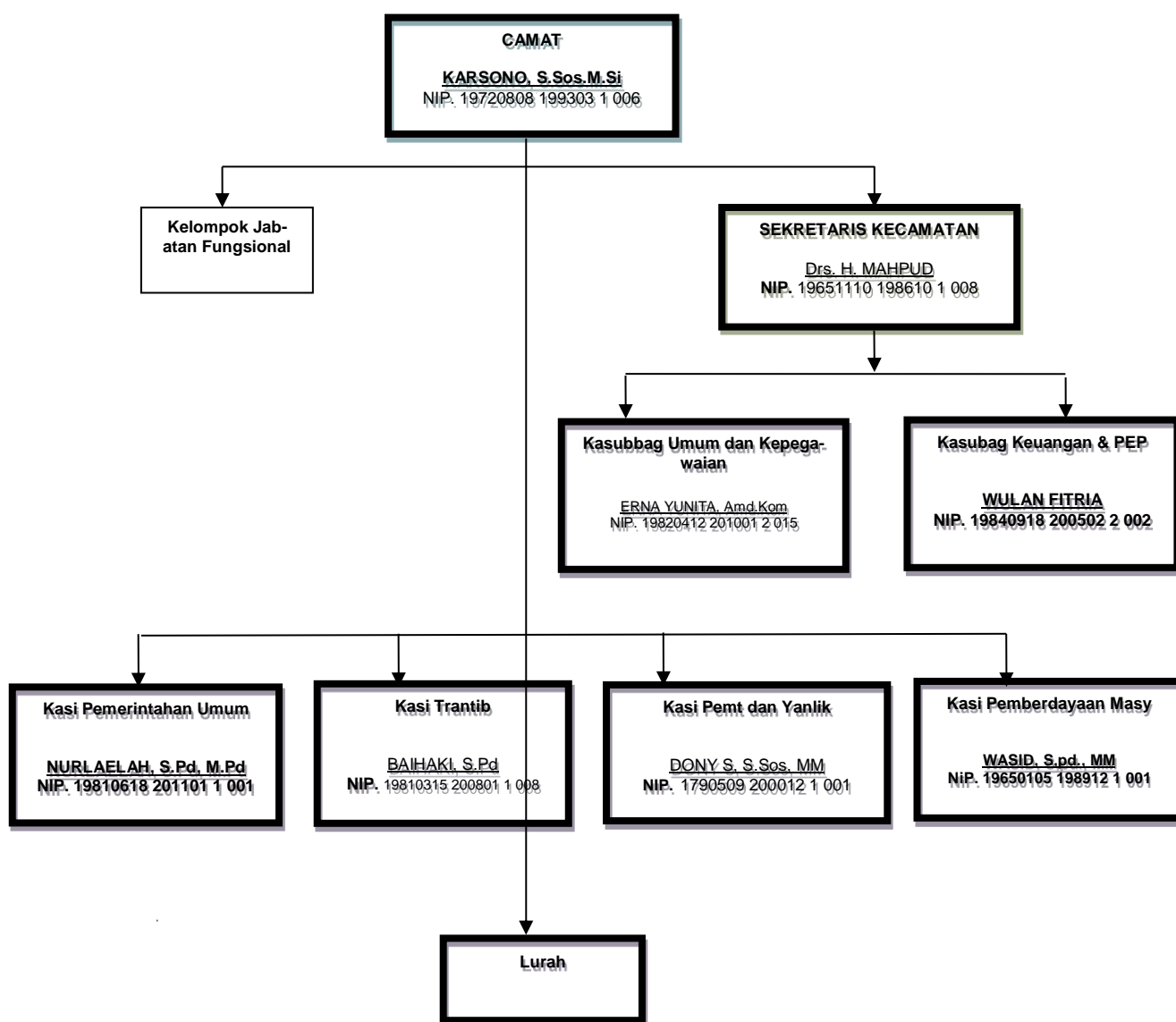
- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan, Program Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemerintahan Umum;

- f. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
- g. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik; dan
- f. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI**



Jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Walantaka adalah 63 orang (9 Orang Aparatur Kecamatan dan 54 Orang Aparatur Kelurahan-kelurahan). Nama dan NIP, Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Jabatan Struktural dapat di lihat pada table di bawah ini :

**Tabel 1.2. Daftar Klasifikasi PNS Kecamatan Walantaka**

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	KARSONO, S.Sos.,M.Si NIP. 19720808 199303 1 006	Pembina TK. I / IV b	Camat
2	Drs. H. MAHPUD NIP. 19651110 198610 1 008	Penata TK.I / III d	Sekretaris Camat
3	WASID,S.Pd,MM NIP. 19650105 198912 1 001	Pembina / IV.a	Kasi PMK
4	DONY S, S.Sos, MM NIP.1790509 200012 1 001	Penata Muda Tk.I / III b	Kasi Pemerintahan Umum & Pelayanan Publik
5	BAIHAKI, S.Pd NIP.19810315 200801 1 008	Penata TK. I / III d	Kasi Trantibum Kec.Walantaka
6	NURLAELAH, S.Pd, M.Pd NIP.19641026 198603 2 012	Penata / III c	Kasi Tata Pemerintahan
7	ERNA YUNITA, Amd.Kom NIP. 19820412 201001 2 015	Penata Muda Tk.1 /III b	Kasubag Umum & Kepegawaian
8	WULAN FITRIA, SE NIP. 19840918 200502 2 002	Penata Muda Tk.1 /III b	Kasubag PEP
9	HUDARI NIP. 19780126 201408 1 002	Pengatur Muda Tk.I / II b	Bendahara Kecamatan
10	Drs. H. TAUFIKUROHMAN NIP. 19680219207011006	Pembina / IV.a	Pengelola Data Kecamatan
<b>KELURAHAN : NYAPAH</b>			
11	AMINUDIN, SE NIP. 19750209 201001 1 009	Penata / III c	Kepala Kelurahan
12	DARMAT, SE NIP. 19740616 199903 1 008	Penata / III c	Sekretaris Kelurahan
13	RITA ROSITA, SE NIP. 19720415 200701 2 012	Penata / III c	Kasi PMK
<b>KELURAHAN : CIGOONG</b>			
14	JAKAR, SP.d NIP. 19851213 201001 1 001	Penata / III c	Kepala Kelurahan
15	MOCHAMAD NAFIRIN, SE NIP. 19770802 200902 1 004	Penata Muda TK. I / III b	Sekretaris Kelurahan
16	RATU MUHDIROH, S.Sos NIP. 19750813 200801 2 006	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
<b>KELURAHAN : WALANTAKA</b>			
17	KOMALASARI, S.Pd NIP. 19800912 200801 2 008	Penata / III c	Kepala Kelurahan
18	SUHARYADI, SE NIP. 19690816 199003 1 008	Penata TK. I / III d	Sekretaris Kelurahan
19	Hj. NANI KUSTINI, S.Tr.,Keb NIP. 19751222 200807 2 006	Penata Muda Tk. I / III b	Kasi PMK
20	AHMAD FAHRUDIN,S.Sos NIP. 197001281 199803 1 002	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
<b>KELURAHAN : PENGAMPELAN</b>			
21	ASRORI, SE NIP. 19820104 201409 1 002	Penata Muda TK. I / III b	Kepala Kelurahan
22	HANAFI, S.Pd.I	Penata / III c	Sekretaris Kelurahan

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
	NIP. 19770306 200801 1 001		
23	FILLY RATNAFURI, S.Kep	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP.19830520 201001 2 016		
24	ERAH SUKHAERAH, S.Pd.SD	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19830203 201001 2 007		
<b>KELURAHAN : KIARA</b>			
25	JADO, S.Ag,M.Si	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19751001 201001 1 003		
26	DICKY SEPTIAN, SH	Penata / III c	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19750919 200901 1 002		
27	KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd	Penata Muda Tk I/ III b	Kasi PMK
	NIP. 19821205 200801 2 004		
28	YAYU SURYATI, S.ST	Penata TK. I / III d	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19740625 200701 2 004		
<b>KELURAHAN : PAGERAGUNG</b>			
29	H. HAMIMI, SE	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19650206 200701 1 016		
30	IIS ISTIHAROH, S.ST	Penata Tk I/ III d	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19750817 200701 2 024		
31	NURHAYATI	Penata Muda Tk I/ III b	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19641022 198305 2 001		
32	NASIROH, S.Pd, MM	Penata Tk I/ III d	Kasi PMK
	NIP. 19830918 200902 2 008		
<b>KELURAHAN : KALODRAN</b>			
33	NINIS NASIFAH, SKM, S.Tr.Keb	Pembina/ IV a	Kepala Kelurahan
	NIP. 19730801 199403 2 006		
34	DANY WIRAWAN, S.Psi	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP. 19750426 201001 1 006		
35	RASPEDI, S.Pd	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19650306 199307 1 001		
36	NENI KHAERATUNNISA, A.Md.Kep	Penata Muda / III a	Kasi Trantib Kel.Kalodran
	NIP. 19841112 201101 2 002		
<b>KELURAHAN : KEPUREN</b>			
37	SUBHAN, SH	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19820420 201001 1 017		
38	LUKMAN HAKIM, SE	Penata Muda TK.I / III b	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19840415 200701 1 005		
39	WAHYUNINGSIH, SKM,MM	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP. 19810728 200604 2 009		
40	UMAR ALI, SH	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19790515 200902 1 005		
<b>KELURAHAN : TERITIH</b>			
41	SADELI, S.Sos, M.Si	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19750825 200906 1 001		
42	NURUL HADI, SKM	Penata TK. I / III d	Kasi PMK
	NIP. 19851107 201001 1 006		
43	ANDRIYANA	Penata Muda / III a	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19851225 201410 1 001		

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
44	ATIN TESNAWATI, S.ST.Keb	Pembina IV/a	Kasi Trantib Kelurahan Teritih
	NIP. 19691105 199101 2 002		
<b>KELURAHAN : PABUARAN</b>			
45	MARYANI, SE	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19681011 200906 1 005		
46	SARIKAH, S.Sos, M.Si	Penata / III c	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19810513 200502 2 003		
47	ENDANG KUSNANDAR,SE	Penata Muda TK. I / III b	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19770710 200801 1 010		
48	JUWIZAT,S.Pd	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP. 19760518 201101 2 001		
49	DIAN NURLELI	Pengatur / II c	Pelaksana
	NIP. 19860313 200902 2 007		
<b>KELURAHAN : PASULUHAN</b>			
50	AAN JAJULI, S.Pd	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19790211 200801 1 004		
51	BINA SAEFUL CHAERUDIN, A.Md	Penata Muda / III a	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 1970905 200501 1 005		
52	KHALILULLAH, S.Pd	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19650610 200502 1 001		
53	RAKIMAN, SE	PENATA TK.I / III d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasuluhan
	NIP. 19670101 199103 1 012		
<b>KELURAHAN : TEGALSARI</b>			
53	SAIDAH, S.Pd	Penata / III c	Kepala Kelurahan
	NIP. 19800820 201001 2 012		
54	Drs. MUKTAR	Penata / III c	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19650714 200701 1 007		
55	TONI AHMADIANA, SKM	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP. 1761028 200902 1 022		
<b>KELURAHAN : PIPITAN</b>			
56	TUTI SUMIYATI,S.Pd	Penata TK.I / III d	Kepala Kelurahan
	NIP. 19680222 200701 2 010		
57	SAIFUL, S.Pd	Penata / III c	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19700706 199003 1 003		
58	SRI MARGORINI, S.Pd, M.Si	Penata Muda / III a	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19661011 198603 2 005		
59	H.ACEP SURYADI, SKM	Penata Muda Tk I/ III b	Kasi PMK
	NIP. 1750827 200604 2 002		
60	JUNAEDI, S.Pd	Penata TK.I / III d	Kasi Trantibum
	NIP.19761211 200801 1 003		
<b>KELURAHAN : LEBAKWANGI</b>			
61	JUPRAN, SE, MM	Penata TK.I / III d	Kepala Kelurahan
	NIP. 19680818 200906 1 005		
62	MOCHAMAD ANTONI NUGRAHA, A.Md	Penata Muda / III a	Sekretaris Kelurahan
	NIP. 19870410 201101 1 001		
63	KOKOM KOMARURROHMAN, S.ST	Penata / III c	Kasi PMK
	NIP.19710603 200604 2 013		
64	SUPARTA WIJAYA, S.Pd	Penata / III c	Kasi PUM & Pelayanan Publik
	NIP. 19851112 201101 1 001		

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis PD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan PD yang disusun oleh setiap PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Serang Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Walantaka disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada kewenangan, tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan nomenklatur terbaru serta memiliki tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran yang berorientasi kepada kinerja hasil dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..

Secara operasional Perubahan Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2018-2023 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023. Namun demikian, saat penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Walantaka Tahun 2018-2023 dilaksanakan

sinergis dengan proses penyusunan *P e r u b a h a n* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Perencanaan strategis menentukan “diarahkan kemana” suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakterhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

### 2.1.1 VISI

Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Kecamatan Walantaka Kota Serang tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kota Serang”, karena seluruh Organisasi Perangkat daerah Kota Serang mengikuti Visi Pemerintah Daerah Kota Serang, Visi adalah suatu pandangan kedepan yang penuh harapan dan cita-cita dan diyakini oleh banyak orang untuk saling bekerjasama dalam mencapai sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Visi Pemerintah Daerah Kota Serang :

**“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”**

**KOTA PERADABAN** dimaknai sebagai Civil Society yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri :

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;



7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Dalam melaksanakan mendukung visi tersebut didukung potensi yang ada di Kecamatan Walantaka, yaitu :

#### **POTENSI PERDAGANGAN DAN JASA**

Posisi Kecamatan Walantaka yang berdekatan dengan pintu masuk dan keluar Kota Serang menuju Jakarta dan daerah Jawa lainnya, dengan dilintasi jalan nasional merupakan potensi pengembangan kawasan permukiman serta potensi berkembang pesatnya perdagangan, maka Kecamatan Walantaka memiliki kesempatan untuk menjadi titik simpul pertukaran barang dan jasa bagi wilayah-wilayah titik pertumbuhan yang ada di sekitarnya tersebut. Berkembangnya permukiman di Kecamatan Walantaka saat ini merupakan dampak dari perkembangan perekonomian di titik-titik pertumbuhan dimaksud, yang dapat menjadi indikasi potensial bagi tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di masa depan.

#### **POTENSI PERTANIAN**

Masih relevan untuk ditawarkan sebagai visi mengingat bahwa transformasi kecamatan yang baik haruslah berjalan secara alamiah sehingga masyarakat pun dapat ikut beradaptasi dan bertransformasi seiring dengan perkembangan kecamatan. Dalam konteks inilah maka mendayagunakan potensi pertanian (dalam arti luas) yang secara alamiah mengkonstruksi karakteristik fisiologis Kecamatan Walantaka adalah sebuah pilihan strategis yang memiliki nilai aksiologis tinggi yang dalam jangka menengah dapat menyelamatkan sebagian besar masyarakat Walantaka yang masih sangat bergantung pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, kehutanan), yang umumnya menjadi kantung-kantung kemiskinan. Kedua, mendayagunakan potensi alamiah yang dimiliki di sektor tersebut guna menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah yang masih banyak terdapat di Kecamatan Walantaka saat ini. Dan Ketiga, dapat menyelamatkan ekologi Kota Serang yang lebih memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dalam konteks ekologis sebagai kondisi alamiahnya ketimbang didayagunakan sebagai kawasan untuk aktivitas ekonomi sektor sekunder. Dengan demikian sejumlah wilayah persawahan produktif dapat diselamatkan dari alih fungsi lahan yang cenderung tak terkendali. Dalam jangka menengah, revitalisasi pertanian ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan Kota Serang sehingga dapat mengurangi dampak dari fluktuasi

ekonomi makro terhadap keterpenuhan kebutuhan primer masyarakat Walantaka. Hal ini juga sejalan dengan nawa cita yang ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui upaya memperkuat swasembada pangan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Kota Serang.

### **POTENSI BUDAYA**

Merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk: (1) membina dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan daerah untuk direvitalisasi sebagai jati diri kecamatan dan masyarakat Kecamatan Walantaka, sehingga dapat mewarnai segenap aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari, serta mewarnai kehidupan pemerintahan daerah; (2) Memelihara dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah untuk didayagunakan nilai ekonominya bagi kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan ekonomi kreatif maupun pengembangan potensi pariwisata alam, seni budaya, dan religi yang telah tumbuh sejak lama.

#### **2.1.2 MISI**

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang disusun agar dapat menyelesaikan Visi yang telah didapatkan. Dengan Misi yang telah ditetapkan maka Pemerintah Daerah dan organisasi tersebut akan terlihat arah dan gerakan dari apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan organisasi tersebut. Isi Misi seyogyanya adalah langkah-langkah ataupun tindakan yang akan dilakukan.

**Misi Pemerintah Daerah Kota Serang :**

- 1. MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN;**
- 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;**
- 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING; dan**
- 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

Oleh karenanya Kecamatan Walantaka Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan komitmen Walikota terpilih yang mengacu pada Visi Kota Serang **“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”** : Pada MISI KEEMPAT (4) yaitu : **“MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK “**

## **2.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi umum untuk pencapaian visi dan misi Kecamatan Walantaka adalah :

1. Meningkatkan tugas dan fungsi Kelurahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan fungsi pelayanan umum, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memacu meningkatnya kualitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat terutama melalui aspek pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan peran aktif masyarakat dan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur.
3. Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan industri kecil (home industri).
4. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban untuk menjamin stabilitas yang kondusif dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Walantaka tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Serang, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kota Serang 2018-2023 kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Walantaka adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa.
2. Peningkatan Akuntabilitas, profesional, dan bermotivasi tinggi Aparatur Kecamatan.
3. Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada Masyarakat.
4. Peningkatan pemberdayaan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
6. Peningkatan operasi penegakan Peraturan Daerah
7. Peningkatan pemantauan terhadap daerah rawan konflik maupun rawan bencana.

## 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan acuan Kinerja Yang digunakan oleh Kecamatan Walantaka untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Walantaka.

### 2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI ( RUMUS PERHITUNGAN )	TERGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat Kecamatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah pada tingkat Kecamatan	- Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	81 %	Kecamatan
			- Hasil evaluasi LkjIP	- Nilai Evaluasi LkjIP	55 %	

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Walantaka

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	Nilai	81
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan	Hasil evaluasi LKjIP	Nilai	55

Perjanjian kinerja memuat target-target yang sudah dimuat dalam PK (penetapan Kinerja) dan penjelasannya apakah ada perbedaan antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Kaitannya perjanjian kinerja yang tertuang dalam satu Perencanaan kinerja, dimana perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Misi ke empat Kecamatan Walantaka Kota Serang maka ditetapkan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022 sebagai berikut :

## 2.2 Tabel Program Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
	Belanja	19,657,859,935
	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	13,356,506,846
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172,598,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,405,771,854
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58,077,000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26,978,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417,888,292
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	268,010,000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,638,019,800
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369,163,900
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161,510,000
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70,830,000
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90,680,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5,738,445,373
11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5,504,675,623
12	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	233,769,750
	PROGRAM KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	7,910,000
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7,910,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	393,487,716
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	393,487,716

## 2.5 RENCANA AKSI PELAKSANAAN KINERJA

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2022, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/ hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Kecamatan Walantaka tahun 2022, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

### 2.3 Tabel Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja Kecamatan Walantaka Tahun 2022

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET.
						KINERJA	PAGU (Rp.)	jan	feb	maret	april	mei	juni	juli	agust	sept	okt	nov	des	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	%	80	19,657,859,935													
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan		Hasil evaluasi LKjIP	Nilai	50	19,657,859,935													
			Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	90	13,356,506,846													
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100	172,598,000													
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PK, RENSTRA PERUBAHAN, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	Dokumen	4	43,198,000	√					√		√				√	
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	81,285,000						√							
3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1	8,050,000						√							
4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Murni	Dokumen	1	4,342,000												√	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET.
						KINERJA	PAGU (Rp.)	jan	feb	maret	april	mei	juni	juli	agust	sept	okt	nov	des	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan dan Pergeseran	Dokumen	2	4,588,000									√				
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi LKPJ, LPPD, LKjIP, evlap dan lapbul	Dokumen	4	21,435,000	√			√			√			√		√	
7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok profil daerah	Dokumen	1	9,700,000										√			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan	%	100	10,405,771,854													
8			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bln	12	10,189,336,854	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dok LK Unaudited dan LK Audited	dok	2	4,007,000													√
10			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah BA Rekonsiliasi Tk Kecamatan dan Kota	dok	16	212,428,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Kecamatan	%	100	58,077,000													
11			Penata Usahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Dokumen Laporan BMD (barang Pakai Habis dan BM)	Dokumen	30	58,077,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai Kecamatan	%	100	26,978,000													



NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET.
						KINERJA	PAGU (Rp.)	jan	feb	maret	april	mei	juni	juli	agust	sept	okt	nov	des	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Peraturan perundang-undangan	Peserta	45	26,978,000							√						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	%	100	417,888,292													
13			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan kebutuhan alat listrik	Bulan	12	1,955,668	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14			Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	12	71,295,054	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15			Penyediaan Logistik Kantor	jumlah bulan penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	Bulan	12	117,304,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang cetakan, fotocopy dan spanduk	Bulan	12	15,070,570	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
17			Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah bulan penyediaan Kunjungan Tamu Tk Kota	Bulan	5	15,000,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
18			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan penyediaan kebutuhan SPPD Luar dan Dalam Daerah	Bulan	12	197,263,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	268,010,000													
19			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	unit	4	173,260,000		√											

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET.
						KINERJA	PAGU (Rp.)	jan	feb	maret	april	mei	juni	juli	agust	sept	okt	nov	des	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana ruang kantor	unit	2	94,750,000		√											
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1,638,019,800													
21			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	Bulan	12	60,760,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan listrik yg dibayar	Bulan	12	497,490,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Jumlah penyediaan publikasi	Even	2						√					√			
23			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebersihan kantor dan petugas keamanan	bulan	12	1,079,769,800													
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	369,163,900													
24			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	10	142,439,500	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
25			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	jumlah unit kendaraan yang dipelihara	unit	34	119,904,400	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET.
						KINERJA	PAGU (Rp.)	jan	feb	maret	april	mei	juni	juli	agust	sept	okt	nov	des	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Operasional atau Lapangan																	
26			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	unit	12	16,844,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
27			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang dipelihara	unit	1	89,976,000						√				√			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SOP/SP/KE-TENTUAN	%	95	161,510,000													
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	%	100	70,830,000													
28			Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Musrenbang Tk Kecamatan	Dokumen	1	55,830,000	√												
29			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yg dinilai dalam Lomba Kelurahan tk Kecamatan	Dokumen	1	15,000,000			√										
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	90,680,000													

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET.	
						KINERJA	PAGU (Rp.)	jan	feb	maret	april	mei	juni	juli	agust	sept	okt	nov	des		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
30			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah SPPT PBB terdistribusi	Tupi	42000	90,680,000				√					√					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kategori kelurahan berkembang	%	55	5,738,445,373														
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian Pemberdayaan Kelurahan	%	80	5,504,675,623														
31			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang Tk Kelurahan	dok	14	199,986,000	√													
32			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan terbangun	ruas jalan	14	560,868,026				√										
33			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RT yg mengikuti KRLA	org	84	4,743,821,597				√										
				Jumlah Masyarakat yg diberdayakan	RT	1457						√		√				√		√	
				Jumlah Balita dan Ibu Hamil yang mendapatkan pendampingan asupan gizi	org	280							√								
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terbina	lembaga	1	233,769,750														

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET.
						KINERJA	PAGU (Rp.)	jan	feb	maret	april	mei	juni	juli	agust	sept	okt	nov	des	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
34			Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Event yang diselenggarakan	event	2	106,426,000			√			√							
35			Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah peserta Pelatihan lembaga masyarakat	org	106	127,343,750	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian penanganan k3	%	75	7,910,000													
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Capaian Laporan pelanggaran PERDA	%	75	7,910,000													
36			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah posko yang dibentuk	Dok	1	7,910,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	85	393,487,716													
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	capaian penyelenggaraan event urusan pemerintahan umum	%	85	393,487,716													

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET.
						KINERJA	PAGU (Rp.)	jan	feb	maret	april	mei	juni	juli	agust	sept	okt	nov	des	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
37			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah event PHBN yang diselenggarakan	event	2	76,995,865								√					
38			Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah event PHBI yang diselenggarakan	event	6	256,491,851			√	√		√			√				√
39			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah penyelenggaraan rakor forkopimcam	bulan	12	60,000,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Kecamatan Walantaka untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Walantaka dimasa yang akan datang. Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Indikator Kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Karena itu, pencapaian sasaran Kecamatan Walantaka dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran telah tercapai. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasarannya telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

### 3.1 PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	Nilai	80	85.98	107.48	sangat tinggi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan		Hasil evaluasi LKjIP	Nilai	50	66.26	132.52	sangat tinggi
			Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	90	90	100.00	sangat tinggi
1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100.00	sangat tinggi
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan	%	100	100	100.00	sangat tinggi
3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Kecamatan	%	100	100	100.00	sangat tinggi
4			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai Kecamatan	%	100	100	100.00	sangat tinggi
5			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	%	100	100	100.00	sangat tinggi



NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100.00	sangat tinggi
7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100.00	sangat tinggi
8			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100.00	sangat tinggi
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SOP/SP/KE-TENTUAN	%	95	95	100.00	sangat tinggi
9			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	%	100	100	100.00	sangat tinggi
10			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	100	100.00	sangat tinggi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kategori kelurahan berkembang	%	60	60	100.00	sangat tinggi
11			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Walantaka	Capaian Pemberdayaan Kelurahan Walantaka	%	80	80	100.00	sangat tinggi

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
12			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terbina	lembaga	1	1	100.00	sangat tinggi
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian penanganan k3	%	70	70	100.00	sangat tinggi
13			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Capaian Laporan pelanggaran PERDA	%	100	100	100.00	sangat tinggi
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Persentase Terselenggaranya Fasilitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	85	85	100.00	sangat tinggi
14			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	capaian penyelenggaraan event urusan pemerintahan umum	%	65	65	100.00	sangat tinggi

### 3.2 TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA	CARA FORMULA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CA-PAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	Nilai rata-rata dari aspek pencapaian, aspek kualitas dokumen dan aspek inovasi	Nilai	80	85.98	107,48	sangat tinggi
Hasil evaluasi LKjIP	Nilai Pelaporan kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat	Nilai	50	66.26	132,52	sangat tinggi

### **3.1.1 Pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Walantaka Tahun 2022**

Sejak tahun 2021 indikator sasaran Capaian Kelurahan yang memenuhi standard kelurahan (berkembang) tidak menjadi indikator sasaran perangkat daerah. Hal ini dikarenakan ada perubahan nomenklatur mengacu pada Permendagri nomor 090 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga perlu penyesuaian dalam menentukan baik indikator sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan. Untuk indikator Capaian Kelurahan yang memenuhi standard kelurahan (berkembang) dialihkan menjadi indikator program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pertimbangan pada program ini meliputi semua aspek dalam pencapaian indikator tersebut baik dari segi perencanaan dengan adanya musrenbang, pembangunan infrastruktur kelurahan hingga peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek.

Rata-rata capaian indikator pada tahun 2022 adalah sebesar 117,52% dengan target kinerja dari 2 indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai melampaui batas yang ditargetkan, yaitu :

#### **a. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang pada tahun 2022 melakukan kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang meliputi pelayanan pada Kecamatan Walantaka yang memiliki objek survey pelayanan PATEN. Berdasarkan hasil kajian BAPPEDA Kota Serang yang bekerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa indeks kepuasan pelayanan pada Kecamatan Walantaka tahun 2022 adalah sebesar 85,98 yang berarti melebihi target yang direncanakan pada dokumen perencanaan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di PATEN Walantaka dapat dipertahankan pada kategori mutu pelayanan B. Capaian ini tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 82,01.

Peningkatan hasil survey kepuasan masyarakat tidak lepas dari komitmen pimpinan bersama para lurah untuk terus berupaya dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap masyarakat. Selain melengkapi sarana dan prasarana pelayanan akan tetapi dengan melakukan evaluasi secara berkala dan memonitoring berjalannya pelayanan.

**IKM PATEN Walantaka Berdasar Indikator Komposit Tahun 2022**

No	Indikator	T-1	T-2	T-3	T-4	Keterangan
1	Kemudahan Persyaratan	88,10	88,46	88,77	88,97	A Di atas rerata
2	Kjelasan Info Persyaratan	89,80	92,23	91,16	90,48	A Di atas rerata
3	Kemudahan Prosedur	90,56	92,70	91,54	90,79	A Di atas rerata
4	Kejelasan Info Prosedur	85,18	85,18	85,37	85,65	B Di atas rerata
5	Ketepatan Waktu Buka Pelayanan	86,23	89,66	89,11	88,76	A Di atas rerata
6	Kesesuaian Waktu Istirahat	87,74	90,63	89,80	89,34	A Di atas rerata
7	Kesesuaian Waktu Tutup	87,08	90,25	89,32	88,94	A Di atas rerata
8	Kewajaran Lama WT Pelayanan	84,01	86,97	86,96	86,97	B Di atas rerata
9	Kewajaran Biaya	88,23	89,15	89,26	89,33	A Di atas rerata
10	Bebas Pungli	91,70	93,83	92,36	91,40	A Di atas rerata
11	Produk Sesuai Harapan	86,67	88,07	87,84	87,71	B Di atas rerata
12	Angka Komplain	83,15	86,21	86,35	86,46	B Di atas rerata
13	Keterampilan Pelugas	85,15	87,22	87,16	87,14	B Di atas rerata
14	Kemampuan Kominfo	88,05	89,45	88,94	88,62	A Di atas rerata
15	Pengalaman Pelugas	86,83	88,39	88,10	87,92	B Di atas rerata
16	Responsivitas Pelugas	85,44	87,23	87,16	87,14	B Di atas rerata
17	Non Diskriminatif	88,83	89,96	89,35	88,96	A Di atas rerata
18	Kesantunan	85,65	85,47	85,76	85,97	B Di atas rerata
19	Keramahan	85,79	86,72	86,76	86,80	B Di atas rerata
20	Maklumat Pelayanan	86,72	86,63	86,69	86,75	B Di atas rerata
21	Integritas Maklumat Pelayanan	77,90	79,79	81,21	82,18	B Di atas rerata
22	Ketersediaan Sarana Pengaduan	77,09	74,24	75,77	76,47	C Di bawah rerata
23	Respon Sesuai Harapan	77,60	74,85	76,40	77,08	B Di bawah rerata
24	Kebersihan Lingkungan	81,35	82,75	84,60	85,30	B Di atas rerata
25	Kenyamanan Ruang Pelayanan	81,79	82,97	85,15	86,82	B Di atas rerata
26	Kebersihan Toilet Umum	65,37	66,43	69,23	71,29	C Di bawah rerata
27	Ketersediaan APAR	60,33	77,54	78,43	79,19	B Di atas rerata
28	Efektivitas Larangan Merokok	69,50	69,46	71,64	73,60	C Di bawah rerata
29	Sarpra Tdk Membahayakan	86,34	86,95	86,79	86,96	B Di atas rerata
30	Keamanan	88,21	86,73	86,52	86,47	B Di atas rerata
31	Sarpra Aksesibilitas	74,90	73,76	76,23	78,03	B Di bawah rerata
32	Rambu-rambu Mitigasi Bencana	78,55	77,25	78,48	79,77	B Di atas rerata
33	Ketersediaan Pelayanan Online	67,81	67,59	70,07	71,80	C Di bawah rerata
34	Penerapan Protokol Kesehatan	78,04	73,47	74,78	75,65	C Di bawah rerata

Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2022

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Mengaktifkan masyarakat untuk mau berpartisipasi menjadi responden dalam mengisi survey kepuasan masyarakat secara online yang disediakan oleh BAPPEDA.
2. Telah dilakukan peningkatan sarana prasarana pelayanan terhadap masyarakat yaitu Ruang Bermain Anak, Ruang Laktasi, fasilitas kursi roda untuk disabilitas, petunjuk parkir kendaraan dan titik kumpul bencana, toilet khusus masyarakat dan washtuffle di pintu masuk ruang pelayanan.



3. Melengkapi sarana dan prasarana pendingin ruangan dan alat pemadam kebakaran untuk memfasilitasi ruang pelayanan PATEN yang sebelumnya belum tersedia.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam petugas pelayanan dalam melaksanakan pelayanan dan selalu berpartisipasi dalam program yang diselenggarakan oleh OPD terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pada tahun 2022 memberlakukan pelayanan pembuatan

data kependudukan secara kolektif oleh Operator SIAK yang ada di Kecamatan. Sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh ke kantor DISDUK-CAPIL secara langsung akan tetapi cukup ke kecamatan.

Apabila mengacu pada table IKM PATEN di atas maka upaya yang akan dilakukan pada tahun 2023 dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi responden dalam mengisi survey kepuasan masyarakat secara online yang disediakan oleh BAPPEDA.
- Menyediakan sarana pengaduan pada setiap pelayanan Kecamatan dan Kelurahan secara online dan offline
- Meningkatkan kebersihan toilet bagi tamu pelayanan
- Mengefektifkan larangan merokok pada ruangan pelayanan
- Berkoordinasi dengan instansi terkait pelayanan public yang melibatkan unsur kecamatan dan kelurahan dalam hal pelayanan secara online
- Meskipun wabah covid-19 telah mereda tapi protocol kesehatan harus tetap diterapkan

#### **b. Hasil evaluasi LKjIP**

Evaluasi dokumen LKjIP dilaksanakan pada awal tahun 2022 yang merupakan laporan capaian kinerja tahun 2021. Evaluasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Serang menerangkan bahwa Kecamatan Walantaka mendapatkan skor 66,26 dengan predikat B = Baik dari skor yang ditargetkan sebesar 50. Sehingga persentase capaian kinerjanya ada pada angka 132,52%. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dengan skor 51,25, LKjIP tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dengan skor 66,26 sehingga rata-rata kenaikannya adalah 29.29%.



Meningkatnya skor hasil revidu Inspektorat merupakan bukti nyata kinerja OPD kecamatan Walantaka dalam berupaya untuk mensukseskan visi misi Kepala Daerah. Hal ini dicapai tidak lepas dari koordinasi dan konsultasi dengan OPD teknis dalam hal ini Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang serta Inspektorat selaku tim yang merevidu dokumen LKjIP Kecamatan Walantaka.

Sesuai hasil rekomendasi dari tim riviud dokumen LKjIP Kecamatan Walantaka berikut adalah perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan :

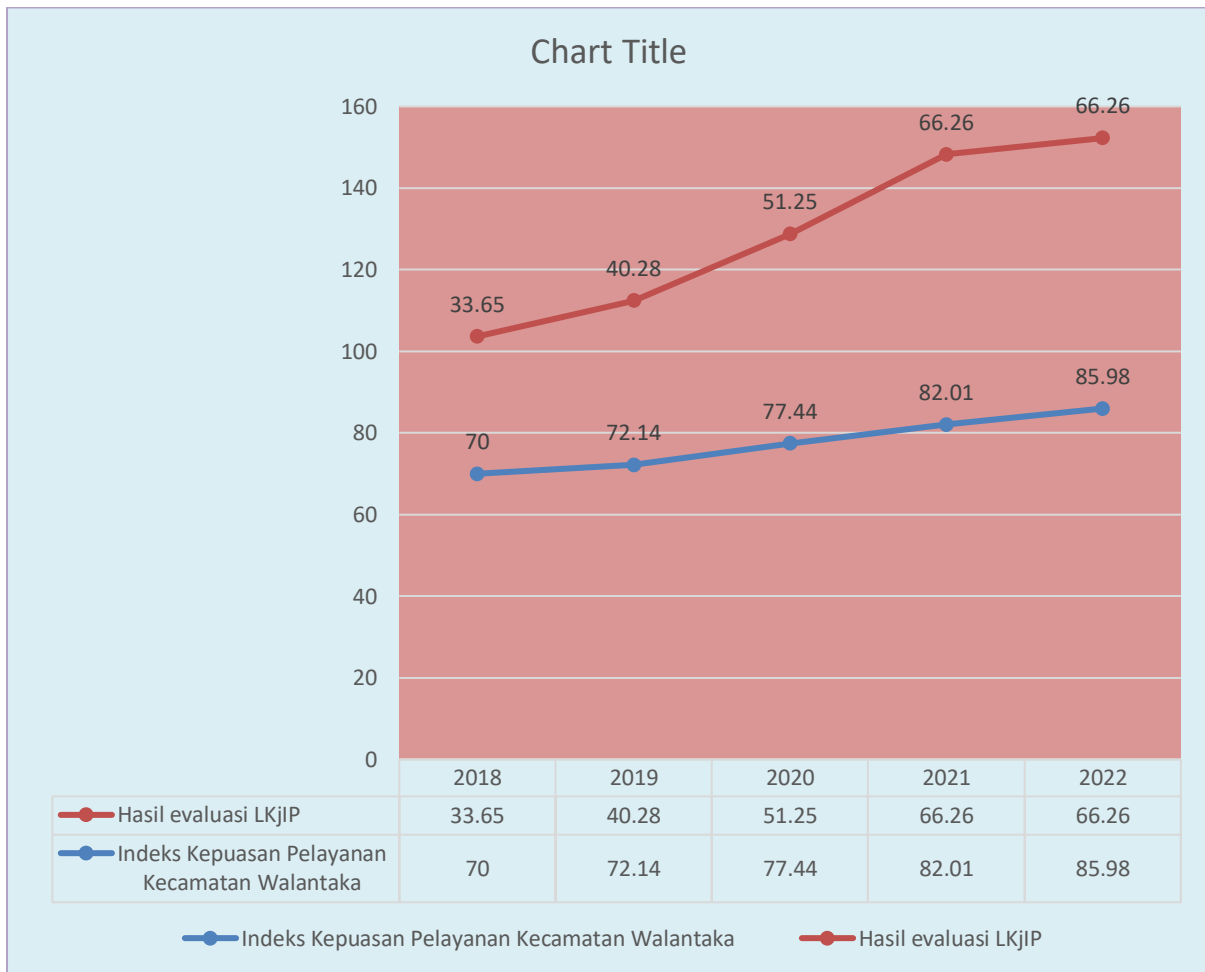
1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi
2. Membuat SOP yang baku mekanisme pengumpulan data capaian kinerja dalam penyusunan LKjIP
3. Hasil Pengukuran Kinerja dijadikan dasar pemberian reward dan punishment
4. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaporan kinerja
5. Pencapaian target kinerja sasaran dalam rencana kerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran
6. Menyajikan informasi terkait penyebab, hambatan, permasalahan atas keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan dalam laporan kinerja



### 3.3 TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2018 s.d 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA PERTAHUN					CAPAIAN KINERJA (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	Nilai	85.98	82.01	77.44	72.14	70.00	0	106.51	103.25	144.28	96.00	0
Hasil evaluasi LKjIP	Nilai	66.26	66.26	51.25	40.28	33.65	0	138.04	111.41	100.70	85.00	0

**GRAFIK PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2018 s.d 2022**



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Walantaka mengalami peningkatan dari tahun dasar Renstra 2018-2023 hingga capaian tahun 2022. Hal ini dikarenakan Kecamatan Walantaka terus berupaya dalam mewujudkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan kemasyarakatan yang baik. Berikut beberapa factor yang mempengaruhi tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Walantaka pada tahun 2022 :

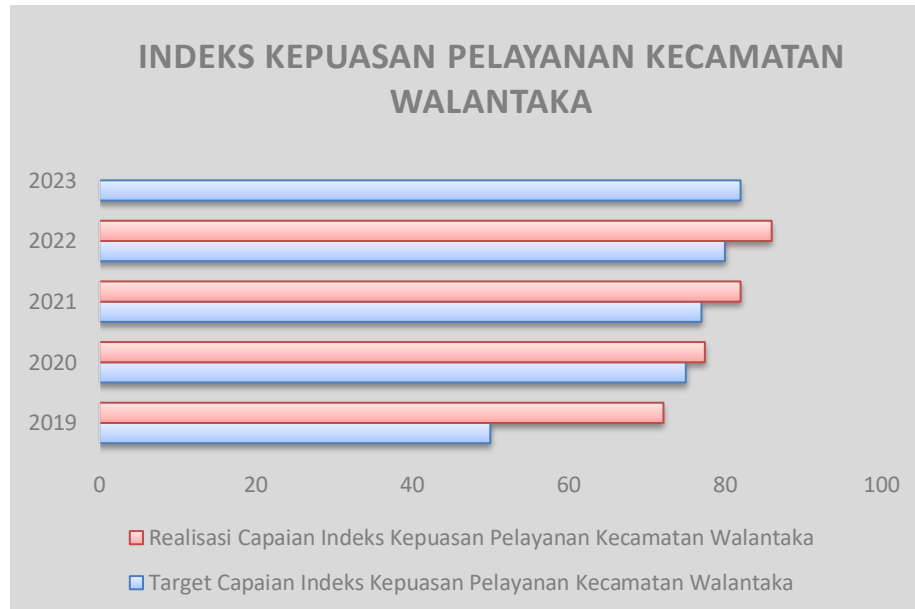
- Komitmen pimpinan untuk melakukan reformasi birokrasi pada aspek kepegawaian untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
- Komitmen pimpinan dalam menciptakan masyarakat yang bersanitasi total berbasis masyarakat dengan menggalakan inovasi WATUJAGA
- Sumber daya yang mulai memadai dari mulai sarana prasarana hingga sumber daya manusia dalam melakukan perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran kecamatan
- Gerakan pemberdayaan kemasyarakatan dengan melibatkan stakeholder atau organisasi masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan baik secara infrastruktur lingkungan maupun kesehatan

**3.4 TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN WALANTAKA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH**

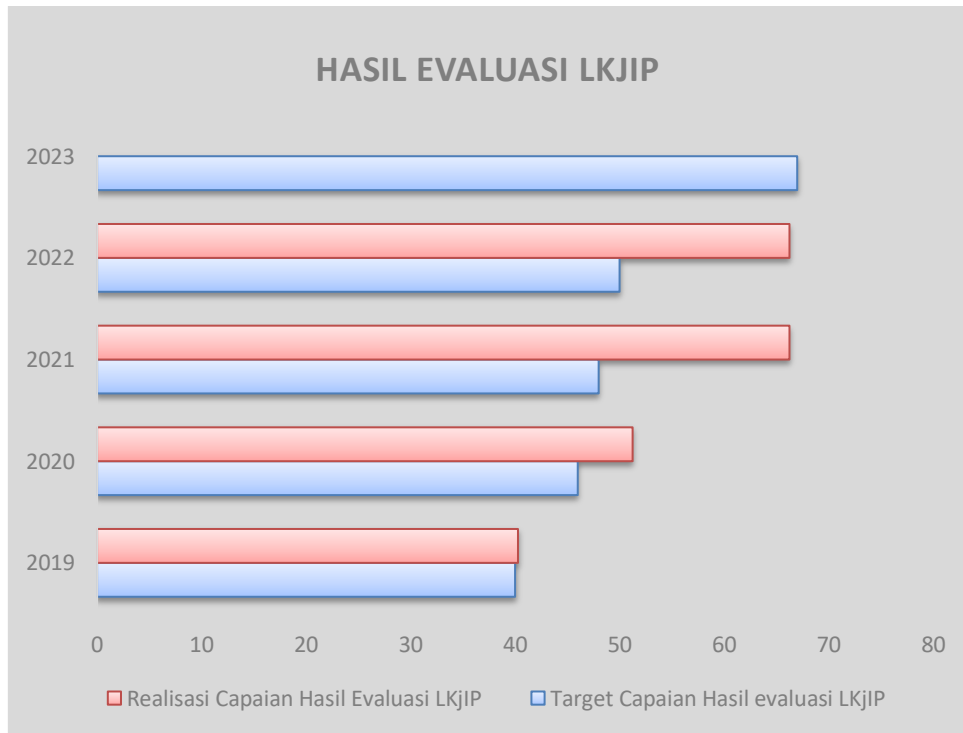
INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RPJM	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA (%)					DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJM
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka	Nilai	82.00	50	75	77	80	82	72.14	77.44	82.01	85.98	0	144.28	103.25	106.51	107.48	0	104.85
Hasil evaluasi LKjIP	Nilai	67.00	40	46	48	50	67	40.28	51.25	66.26	66.26	0	100.70	111.41	138.04	132.52	0	98.90

Pada Pengukuran Kinerja ini dilakukan juga pengukuran pada kinerja kegiatan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian pada tahun dasar hingga tahun 2022 agar dapat diketahui capaian kinerja kegiatan pada masing-masing tahun dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada misi perangkat daerah. Dan untuk mengetahui kemajuan kinerja kecamatan Walantaka tahun 2022 atas perbandingan kinerja kecamatan dengan kondisi akhir RENSTRA Kecamatan. Selanjutnya perbandingan capaian kinerja hingga tahun 2022 dibandingkan dengan kondisi akhir Perubahan Kedua RENSTRA Kecamatan Walantaka adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka tercapai melebihi target yang direncanakan pada kondisi akhir Renstra tahun 2023 yaitu target capaian dengan nilai 82 telah tercapai pada tahun 2022 dengan nilai 85.98 sehingga persentasi men-  
capai 104.85%



- b. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditarget dengan nilai 67 pada tahun akhir Renstra 2023, sedangkan LKjIP tahun 2021 telah mencapai nilai 66,26 sehingga target persentase mencapai 98,90%.



**3.5 Tabel Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Walantaka tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Walantaka				Nilai	80	85.98	107.48	sangat tinggi
2	Hasil evaluasi LKjIP				Nilai	50	66.26	132.52	sangat tinggi
		Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	90	90	100.00	sangat tinggi
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	jml	14	14	100.00	sangat tinggi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan	jml	2	2	100.00	sangat tinggi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Kecamatan	%	2	2	100.00	sangat tinggi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai Kecamatan	%	100	100	100.00	sangat tinggi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	bln	12	12	100.00	sangat tinggi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jml	100	100	100.00	sangat tinggi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln	12	12	100.00	sangat tinggi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	100	100	100.00	sangat tinggi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SOP/SP/KE-TENTUAN	%	95	95	100.00	sangat tinggi
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	%	100	100	100.00	sangat tinggi
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	100	100.00	sangat tinggi
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase kategori kelurahan berkembang	%	60	60	100.00	sangat tinggi
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian Pemberdayaan Kelurahan	%	80	80	100.00	sangat tinggi
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terbina	lembaga	1	1	100.00	sangat tinggi



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KINERJA PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian penanganan k3	%	70	70	100.00	sangat tinggi
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Capaian Laporan pelanggaran PERDA	%	100	100	100.00	sangat tinggi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	85	85	100.00	sangat tinggi
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	capaian penyelenggaraan event urusan pemerintahan umum	%	85	85	100.00	sangat tinggi

## 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan penunjang kesekretariatan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Program ini terdiri dari kegiatan perencanaan pelaporan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, pemeliharaan dan pengadaan barang milik daerah. Secara umum capaian indikator kinerja program ini adalah 90%.

Output subkegiatan yang tercapai pada program ini sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	dokumen	14	Renstra Perubahan, PK Murni, PK Perubahan, RENJA Murni, Renja Perubahan, RKA Murni, RKA Pergeseran, DPA Murni, DPA Pergeseran, Dok Penilaian Risiko, Renja RB, LKJIP, LPPD, LKPJ
2	Administrasi Keuangan	dokumen laporan keuangan	dokumen	3	Laporan Keuangan Unaudited, Laporan Keuangan Audited, Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Bulanan
3	Administrasi Kepegawaian	peserta Bimtek Kepegawaian	orang	50	
4	Administrasi BMD	Laporan BMD	dokumen	2	Belanja Modal dan Persediaan Barang Pakai Habis Kecamatan dan 14 Kelurahan
5	Administrasi Umum	pelayanan kesekretariatan	bulan	12	
6	Pemeliharaan BMD	kendaraan yang dipelihara	unit	12	kendaraan roda dua dan kendaraan roda 4 di kecamatan dan 14 kelurahan
7	Pengadaan BMD	gedung yang dibangun	unit	2	Pagar dan parkir Kantor Kecamatan

**Keberhasilan** : Tersusunnya dokumen yang bahkan tidak termasuk ke dalam target kegiatan pada DPA atau tidak teranggarkan seperti Dokumen Penilaian Risiko dan Dokumen Reformasi Birokrasi

**Hambatan** : Beban kerja yang melebihi kapasitas SDM eselon IV untuk mengelola kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan bisa di lihat dari capaian dokumen yang mencapai 17 dokumen dalam satu tahun anggaran

Saran : Menyampaikan usulan kepada pimpinan untuk melakukan pemisahan tupoksi antara Kasubag Keuangan dan PEP.

## **2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Program ini terdiri dari dua kegiatan dan 3 subkegiatan sebagai media untuk menunjang kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Capaian indikator kinerja program ini adalah persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai sop/sp/ketentuan sebesar 80% dengan serapan anggaran 99,04%. Output subkegiatan yang termasuk dalam program ini adalah dokumen musrenbang, partisipasi dalam lomba kelurahan dan distribusi SPPT PBB kepada Wajib Pajak yang memiliki tanah dan bangunan di Wilayah Kecamatan Walantaka.

Keberhasilan : Kecamatan Walantaka mendapatkan reward dari Pemerintah Kota sebagai kecamatan dengan realisasi PBB tertinggi pada tahun 2022

Hambatan : Kurangnya pemahaman dan motivasi bagi aparatur kelurahan dalam mengikuti ajang lomba kelurahan

Saran : Memberikan reward kepada kelurahan yang berprestasi

## **3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Program ini merupakan penunjang dalam rangka memberdayakan perempuan dan masyarakat di Lingkungan Kecamatan Walantaka dengan indikator kinerja Capaian Kelurahan yang memenuhi standard kelurahan (berkembang). Formulasi perhitungan capaian berdasarkan hasil Laporan Data Evaluasi Perkembangan Kelurahan tahun 2022 melalui aplikasi online milik Kemendagri dengan link <http://epdeskel.kemendagri.go.id>. Dari 14 (empat belas) kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Walantaka, hingga laporan ini disusun sebanyak 11 (sebelas) kelurahan telah selesai melakukan penginputan data pada aplikasi tersebut.

### 3.6 Tabel Hasil Laporan EPDESKEL tahun 2022

No	Nama Kelurahan	Bid. Pemerintahan	Bid. Kewilayahan	Bid. Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan
1	Walantaka	92	56	167	315	Berkembang
2	Cigoong	56	73	159	288	Berkembang
3	Nyapah	103	71	172	346	Berkembang
4	Pangampelan	57	59	169	285	Berkembang
5	Kiara	110	73	172	355	Cepat Berkembang
6	Pager Agung	113	91	180	384	Cepat Berkembang
7	Kalodran	92	49	157	298	Berkembang
8	Kepuren	114	77	185	376	Cepat Berkembang
9	Teritih	108	69	175	352	Cepat Berkembang
10	Pabuaran	116	90	184	390	Cepat Berkembang
11	Pasuluhan	107	85	165	357	Cepat Berkembang
12	Tegalsari	111	67	159	337	Berkembang
13	Pipitan	111	78	183	372	Cepat Berkembang
14	Lebakwangi	106	62	193	361	Cepat Berkembang

Kelurahan Berkembang berjumlah 6 kelurahan yaitu :

1. Walantaka
2. Cigoong
3. Nyapah
4. Pangampelan
5. Kalodran
6. Tegalsari

Kelurahan Cepat Berkembang 8 kelurahan yaitu :

1. Kiara
2. Pager Agung

3. Kepuren
4. Teritih
5. Pabuaran
6. Pasuluhan
7. Pipitan
8. Lebakwangi

Sehingga hitungan formulasi capaian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kelurahan dengan status cepat berkembang}}{\text{Jumlah seluruh Kelurahan}} \times 100\%$$

Dengan hasil sebagai berikut :

$$= \frac{8}{14} \times 100\%$$

$$= 57,14\%$$

Capaian kelurahan dengan status cepat berkembang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 50% menjadi 57,14%.

Selain keberhasilan dalam capaian status Kelurahan Cepat Berkembang, pada program ini Kecamatan Walantaka berhasil meraih capaian indikator lainnya yaitu :

- a. Juara Umum dengan paling banyak meraih juara dalam event Lomba Kampung Resik lan Aman tingkat Kota Serang
- b. Penghargaan dalam IGA AWARD inovasi non pemerintah dengan inovasi WATUJAGA Kecamatan Walantaka. Inovasi ini dibentuk dengan dasar keprihatinan atas banyaknya warga di Lingkungan Kecamatan Walantaka yang masih melakukan buang air besar sembarangan dikarenakan tidak memiliki jamban dirumahnya masing-masing.

Dalam Inovasi WATUJAGA Kecamatan Walantaka berhasil mendeklarasikan 9 (sembilan) kelurahan ODF (Open Defecation Free) yaitu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga untuk memutuskan rantai penularan ini harus dilakukan rekayasa pada akses ini. Agar usaha tersebut berhasil, akses masyarakat pada jamban (sehat) harus mencapai 100% pada seluruh komunitas. Sedangkan Kelurahan ODF (Open Defecation Free) adalah kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 dari 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (1).

Kelurahan yang telah deklarasikan ODF sebanyak 9 kelurahan yaitu :

- a. Walantaka
- b. Cigoong
- c. Tegalsari
- d. Pipitan
- e. Kiara
- f. Kalodran
- g. Nyapah
- h. Pabuaran
- i. Pasuluhan

Sementara Kelurahan yang masih berprogres dalam pelaksanaan STBM WATUJAGA sebanyak 5 (lima) kelurahan yaitu :

- a. Kepuren
- b. Pangampelan
- c. Lebakwangi
- d. Teritih

e. Pager Agung





c. Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

**3.7. Tabel Lokus Sarpras Kelurahan**

No	Nama Kelurahan	Spek Pekerjaan	Lokasi	Volume	Harga Satuan	jumlah anggaran
1	Teritih	TPT	Kp. Ketileng	114 m2	293,000.00	33,402,000
2	Walantaka	Drainase	RT 10/05	95 m2	350,000.00	33,250,000
3	Lebakwangi	Paving Blok	Lingk Cibonteng RW 001	155 m2	215,000.00	33,325,000
4	Kepuren	Drainase	Lingk Kepuren RT 01/22	95 m2	350,000.00	33,250,000
5	Pager Agung	Drainase	cibadak rt 10/03	95 m2	350,000.00	33,250,000
6	Pangampelan	Drainase	Lingk Jelalang	95 m2	350,000.00	33,250,000
7	Kiara	Paving Blok	Lingk Prisen RT 01/03	155 m2	215,000.00	33,314,250
8	Pipitan	Drainase	Lingk Tegal Kembang RT 12/03	95 m2	350,000.00	33,250,000



9	Cigoong	Paving Blok	Kp. Pengasinan RT 012/003	155 m2	215,000.00	33,292,750
10	Nyapah	TPT	lingk nyapah kantor rt 01/03	114 m2	293,000.00	33,402,000
11	Pabuaran	Paving Blok	lingk pedali rt 07/02	155 m2	215,000.00	33,325,000
12	Tegalsari	Paving Blok	RT 05/03	155 m2	215,000.00	33,325,000
13	Pasuluhan	Paving Blok	kp pasuluhan rt 06/03	155 m2	215,000.00	33,325,000
14	Kalodran	Paving Blok	Kp. Melandang RT.006/ RW. 003	155 m2	215,000.00	33,325,000
J U M L A H						466,286,000

#### 4) **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Program ini koordinasi dengan aparat teknis dalam penegakan PERDA dilingkungan Kecamatan dengan melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan APH baik tingkat kecamatan maupun tingkat Kota terkait penegakan PERDA dan undang-undang yang menyangkut ketertiban dan ketentraman masyarakat serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi.

#### 5) **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Turunan dari Program ini yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terdiri dari 3 sub-kegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan PHBI dan PHBN tingkat kecamatan sebagai partisipan dalam PHBI PHBN tingkat kota. Serta untuk fasilitasi Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Pada pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam yaitu event MTQ tingkat Kota Serang, Kecamatan Walantaka meraih juara ke 3 sedangkan pada event Panjang Mulud meraih juara ke 1.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Walantaka Tahun Anggaran 2022 memuat lima program dan 140 (seratus empat puluh) kegiatan serta 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sub-kegiatan dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut :

1. Anggaran Murni : Rp. 20.665.310.084,-  
Rasionalisasi anggaran : Rp. 1.007.450.149,-  
Anggaran Perubahan : Rp. 19.657.859.935,-
2. Realisasi anggaran Belanja total sebesar Rp. 19.370.251.375,- atau 98,54%  
saldo pagu anggaran sebesar Rp. 287.608.560.- atau 1,46%
3. Beberapa point penting pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

No	URAIAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN yang terbagi atas 14 kelurahan yang diwakelolakan kepada POKMAS Rp. 5.504.675.623,-	Realisasi 99,52% Rp 5.478.434.230,-
-	honor masyarakat sebanyak 2.039 org (bertambah sebanyak 52 org dari tahun 2021) dengan anggaran Rp. 4.002.480.000,-	Realisasi 50% sebesar Rp. 4.002.480.000,-
-	untuk KRLA Rp. 30.000.000 x 14 kel = Rp. 420.000.000	Realisasi Rp. 420.000.000 14 kelurahan
-	untuk pendampingan pemberian asupan gizi bagi balita gizi buruk dan stunting dengan target 20 orang peserta per kelurahan selama 4 bulan Rp. 24.050.000 x 14 kel = Rp. 336.700.000	Realisasi 100% Rp. 336.700.000 14 kelurahan
-	untuk infrastruktur kelurahan di swakelola oleh POKMAS Rp. 560.868.026 terbagi di 14 kelurahan dengan 14 lokus	Realisasi 99,99% Rp. 560.825.026 14 kelurahan
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

No	URAIAN	KETERANGAN
-	Koordinasi penegakan PERDA Rp. 7.910.000	Realisasi 85,34 % sebesar Rp. 6.750.000,-
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
-	Penyelenggaraan PHBI, PHBN dan kegiatan forkopimcam dengan total pagu sebesar Rp. 393.487.716,-	Realisasi 99,98% Rp. 393.417.000,-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan, pendistribusian PBB dan Lomba Kelurahan dengan total pagu program sebesar Rp. 161.510.000,-	Realisasi 96,52% Rp. 155.890.000,-

### 3.8 PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN WALANTAKA TAHUN 2022

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan		19,657,859,935	19,370,251,375	98.54	
			Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	13,356,506,846	13,110,380,395	98.16	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172,598,000	172,420,000	99.90	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,405,771,854	10,209,866,582	98.12	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58,077,000	58,077,000	100.00	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26,978,000	26,978,000	100.00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	417,888,292	411,145,955	98.39	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	268,010,000	263,515,800	98.32	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,638,019,800	1,609,355,318	98.25	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369,163,900	359,021,740	97.25	

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161,510,000	155,890,000	96.52	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70,830,000	66,220,000	93.49	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90,680,000	89,670,000	98.89	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5,738,445,373	5,703,813,980	99.40	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5,504,675,623	5,478,434,230	99.52	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	233,769,750	225,379,750	96.41	
			PROGRAM KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	7,910,000	6,750,000	85.34	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7,910,000	6,750,000	85.34	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	393,487,716	393,417,000	99.98	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	393,487,716	393,417,000	99.98	

## **BAB IV**

### **TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi data Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka kami terus berupaya dalam meningkatkan nilai evaluasi LKjIP dengan langkah-langkah yang telah direkomendasikan oleh tim Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kota Serang sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap SDM di tingkat kelurahan dalam mengelola program kegiatan subkegiatan sehingga bisa akuntabel dalam merumuskan target dan capaian indikator kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian perjanjian kinerja kecamatan dan;
3. Mengoptimalkan pengaplikasian SOP pengumpulan data dalam rangka menunjang penyusunan dokumen pelaporan;
4. Melakukan perbaikan kinerja dalam reformasi birokrasi.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisikan tingkat keberhasilan / kegagalan yang di cerminkan oleh hasil evaluasi dan formulasi perhitungan indikator-indikator kinerja sebagaimana yang di tunjukan dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan para pembuat keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih mendalam.

### **5.2 PROYEKSI MASA DEPAN**

Proyeksi di masa depan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Walantaka diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan pelayanan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM Kecamatan Walantaka, memantapkan fungsi kelembagaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan diberlakukannya peraturan daerah Kota Serang nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Serang sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2022 perubahan peraturan daerah Kota Serang nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, diharapkan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan Walantaka beserta jajarannya di kelurahan secara arif dan cerdas agar pelaksanaan pelayanan dan pembangunan tidak menyimpang dari aturan yang ada.

- 2) Meningkatkan koordinasi antara institusi Kecamatan Walantaka dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme pelayanan serta pembangunan di Kecamatan Walantaka. Melalui program musyawarah pembangunan dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
- 4) Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses pelayanan dan pembangunan. Melibatkan setiap unsur masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan dan pembangunan.
- 5) Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD dan OPD Kecamatan dengan Kelurahan guna mendukung terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan sinergis.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan *standard operating procedure (SOP)* pada Kecamatan Walantaka sesuai dengan nomenklatur yang baru.
- 7) Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan. Dengan terus melakukan pendampingan dan pelatihan terhadap SDM baik di kelurahan maupun kecamatan. Karena setiap pekerjaan pemerintahan telah berbasis e-government seperti system untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan dan barang milik daerah.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Walantaka kota Serang di susun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Walikota Serang melalui cq. Bagian Organisasi.

Sebagai akhir kata, kami beserta aparatur Kecamatan Walantaka mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Tahun 2022 ini dapat memenuhi akuntabilitas kami kepada Stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Walantaka, 27 Januari 2023

**CAMAT WALANTAKA**  
  
**MUSLIM SHOLEH, S.Pd.,M.Si**  
NIP.19800410 200801 1 010

# LAMPIRAN